

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH KERAJINAN PERAK DI KOTAGEDE YOGYAKARTA

COLLABORATIVE GOVERNANCE ON DEVELOPMENT MIDDLE LEVEL INDUSTRY SILVER CRAFTS OF KOTAGEDE YOGYAKARTA

Oleh: Berliana Indrawati dan Argo Pambudi, M.Si.,
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. berlianaindrawati53@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *collaborative governance* dalam pengembangan industri kecil menengah kerajinan perak di Kotagede dan faktor penghambat dalam pengembangannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *collaborative governance* dalam pengembangan IKM kerajinan perak di Kotagede sudah berjalan dengan baik namun belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan struktur jaringan yang tidak mengikat, komitmen masing-masing aktor, kepercayaan masing-masing aktor, adanya kejelasan aturan dan tugas masing-masing aktor, adanya kewenangan setiap aktor, keterbukaan informasi dan ketersediaan akses terhadap sumber daya. Adapun faktor penghambat yang muncul adalah kurangnya partisipasi aktif dari pengrajin dalam program pengembangan dan pemerintah yang kurang inovatif dalam kegiatan pengembangan.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, IKM kerajinan perak

Abstract

This research aims to know the collaboration by the city government of Yogyakarta in the development of silver middle level industries in Kotagede and inhibiting factors in the development of silver middle level industries in Kotagede. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. Collaboration in the development of silver middle industries in Kotagede has run quite well. It proved by a) there is no binding structure in collaboration, b) each actor has commitment for collaboration, c) every actor believe each other, d) there is clarity of collaboration members, rules and clarity of the roles and tasks of each collaboration actors, e) there is authority on procedures, f) there is no division of decision making but there is a division of authority and responsibility, g) information disclosure by sharing information equally, h) access to activity resources both funds, trainers and development facilities can be used properly. The obstacle factors are participants on the program are passive and the government to be less innovative in developing middle-level industries in Kotagede.

Keywords: *collaborative governance, silver middle industry*

PENDAHULUAN

Perkembangan dan kemajuan zaman menuntut masyarakat untuk mencari peluang kerja dan berkarya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Persaingan global saat ini memunculkan Industri Kecil Menengah (IKM) untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi angka pengangguran. Sektor IKM menurut Thoha dalam Husada (2009:14) dapat menjadi sabuk pengaman bagi masalah sosial ekonomi seperti penyedia peluang kerja.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi IKM yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Salah satunya adalah kerajinan perak di Kotagede yang merupakan cabang industri unggulan di Kota Yogyakarta yang memiliki potensi terhadap pendapatan masyarakat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta mencatat, terdapat 65 IKM kerajinan perak di Kotagede yang perlu mendapat program pengembangan.

Melihat potensi yang besar terhadap industri kerajinan perak, pemerintah kota Yogyakarta melakukan program pengembangan IKM kerajinan perak dengan pelatihan dan pembinaan. Pelatihan berupa pengembangan *design*,

pelatihan *e-commerce*, dan kegiatan pembinaan melalui kegiatan pameran. Pemerintah dalam melakukan program pengembangan berkolaborasi dengan praktisi pengusaha perak, Lembaga Pengabdian Masyarakat Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (LPM AMIKOM) Yogyakarta, Koperasi Produksi Pengusaha Perak Yogyakarta (KP3Y) dan Pelaku industri kerajinan perak (pengrajin).

Dalam memberikan pelatihan pengembangan *design*, pemerintah berkolaborasi bersama praktisi pengusaha perak yang bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan bagaimana cara memproduksi kerajinan perak yang berkualitas, bagaimana cara mengembangkan *design*, dan mem-branding hasil produksi. Pelatihan *e-commerce* dilakukan pemerintah bersama AMIKOM Yogyakarta untuk mengatasi permasalahan mengenai rendahnya pengetahuan pengrajin akan pemasaran *online*. Namun, dalam kegiatan pelatihan tersebut terdapat kendala yaitu pengrajin yang kurang aktif dalam mengikuti pelatihan.

Pasifnya pengrajin akan program pengembangan didukung dengan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan

tahun 2019 yang menunjukkan menurunnya minat pengrajin akan industri kerajinan perak mengakibatkan jumlah unit usaha dan jumlah pengrajin industri perak semakin turun. Penurunan tersebut didasari oleh permasalahan mahal nya bahan baku dan daya beli masyarakat yang semakin menurun. Keterpurukan kerajinan perak di Kotagede diperparah oleh minimnya generasi muda yang berminat menggeluti usaha kerajinan perak.

Dengan rendahnya pengetahuan akan pemasaran *online* dan pasifnya pengrajin dengan program pengembangan, diperlukan adanya *collaborative governance* untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ansell and Gash (2007:544) menyebutkan bahwa baik satu atau lebih daripada organisasi publik, organisasi non-negara, dan masyarakat terlibat langsung dalam proses pengambilan suatu kebijakan yang berorientasi pada konsensus.

Sejalan dengan uraian diatas, upaya *collaborative governance* dalam pengembangan IKM industri kerajinan perak dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, pihak swasta seperti praktisi dan AMIKOM serta masyarakat Kotagede yang bermata pencaharian sebagai pengrajin atau pelaku IKM yang tergabung dalam Koperasi Produksi Pengusaha Perak (KP3Y).

Pemerintah berperan sebagai fasilitator, swasta sebagai mitra, dan pengrajin sebagai objek pengembangan IKM kerajinan perak. Ketiga aktor tersebut merupakan komponen yang dapat membantu mengatasi kendala dalam pengembangan IKM kerajinan perak Kotagede.

Ansell and Gash (2007:557-561) menjelaskan ukuran keberhasilan *collaborative governance* dapat dilihat dari seberapa aktif kolaborasi yang dilakukan antar stakeholders yaitu *face to face dialog, trust building, commitment to process, share understanding* dan *intermediet outcomes*. Selain itu, keberhasilan kolaborasi juga dapat dilihat dari fase kolaborasi. Hal tersebut dapat dilihat dari tahapan bagaimana cara terbentuknya dari awal hingga akhir Morse and Stephens (2012:567) tahapan ini berkaitan dengan kondisi awal yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi berupa *assesment, initiation, deliberation* dan *implementation*

Penjelasan lain mengenai keberhasilan kolaborasi dapat dilihat dari penjelasan Bryson and Crosby (2006:44-55) yang terdiri dari *initial condition, structure and governance, dan process*

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan ukuran keberhasilan

collaborative governance menurut DeSeve dalam Sudarmo (2011:110-116) yang menjelaskan ukuran keberhasilan kolaborasi melalui delapan indikator (1) *Network structure*, (2) *commitment to a common purpose*, (3) *trust among the participants*, (4) *governance*, (5) *access to authority*, (6) *distibutive accountability*, (7) *information sharing* dan (8) *Access to resources*.

Teori *collaborative governance* dari DeSeve dipilih karena dalam penelitian *collaborative governance* dalam pengembangan IKM kerajinan perak di Kotagede peneliti berorientasi pada aktor yang terlibat serta peran masing-masing aktor dalam pengembangan IKM kerajinan perak.

Penelitian ini penting dilakukan karena diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran, masukan dan rekomendasi kepada *stakeholders* yang terlibat untuk lebih meningkatkan peran dalam kegiatan pengembangan.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah kecamatan Kotagede di Kota Yogyakarta. pemilihan lokasi ini karena Kecamatan Kotagede merupakan pusat industri kerajinan perak terbesar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mendukung untuk pengumpulan data primer. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan alat perekam dan kamera sebagai dokumentasi dari instansi terkait.

Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi pada lokasi penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen dari subjek penelitian baik langsung maupun tidak langsung.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara menurut Moleong (2008:186) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan petunjuk umum wawancara yang berisi garis besar rumusan penelitian, selanjutnya dikembangkan menjadi beberapa pertanyaan yang mewakili topik penelitian.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan cara penting untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini melakukan pengamatan langsung menggunakan pancaindra yaitu melihat, mendengar, dan perasaan. Kegiatan observasi dalam penelitian berkaitan dengan aktivitas pengembangan IKM kerajinan perak di Kotagede.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mengambil data dari catatan, dokumentasi, arsip yang sesuai dengan penelitian.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Moleong (2008:330) menjelaskan, untuk memeriksa keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding. Dalam penelitian ini melakukan teknik triangulasi dengan cara membandingkan hasil wawancara atau informasi yang didapat dari informan penelitian satu dengan lainnya. Selain itu, penelitian ini membandingkan teori dengan kenyataan di lapangan.

Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:144) sebagai proses analisis yang

dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data. Proses tersebut ada empat tahap: 1) tahap pengumpulan data, 2) tahap reduksi data, 3) tahap penyajian data, 4) penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengembangan IKM kerajinan perak di Kotagede merupakan program pengembangan yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014. Pengembangan IKM kerajinan perak dilakukan oleh Dinas Perindustrian Kota Yogyakarta (Disperindag Kota Yogyakarta) melalui kegiatan pengembangan *design*, pelatihan *e-commerce* dan pameran. Dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, Dinas bekerja sama dengan praktisi pengusaha perak dalam pelatihan *design*, AMIKOM Yogyakarta dalam hal pelatihan *e-commerce*, dan bekerjasama dengan KP3Y beserta pengrajin dalam kegiatan pameran.

Kegiatan pelatihan *design* dilakukan setiap setahun sekali dengan menyewa lokasi pembuatan kerajinan perak yang memadai. Kegiatan pelatihan *e-commerce* dilakukan setahun sekali pada bulan Februari/Maret dan dilaksanakan di AMIKOM Yogyakarta. Sedangkan untuk pameran, juga dilaksanakan setahun sekali pada bulan November dan dilaksanakan di

lokasi yang dapat berubah-ubah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Setiap aktor memiliki peran masing-masing dalam kegiatan pengembangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai fasilitator, praktisi dan AMIKOM sebagai tenaga pelatih, KP3Y sebagai wadah berkumpulnya pengrajin, dan pelaku IKM (pengrajin) sebagai objek pengembangan. Pengembangan IKM kerajinan perak ini merupakan bentuk *collaborative governance* dalam arti proses. Ansell and Gash (2007:544) menyebutkan bahwa *collaborative governance* dalam arti proses merupakan serangkaian proses atau cara mengatur/mengelola atau memerintah secara institusional. Penelitian ini lebih berkepentingan untuk menganalisis atau meneliti pada kolaborasi antar stakeholders dalam pengembangan IKM.

Struktur jaringan (*network structure*) antar *stakeholders* yang terlibat melalui koordinasi dan sosialisasi. Koordinasi dilakukan untuk menjalin komunikasi dan bertukar informasi dalam mencapai tujuan. Sosialisasi yang dilakukan merupakan upaya edukasi terkait pengembangan IKM kerajinan perak. Koordinasi dilakukan beberapa hari sebelum dilaksanakannya kegiatan. Selain itu kolaborasi yang terjalin antar *stakeholders* tidak ada struktur yang

mengikat. Struktur hanya terdapat pada masing-masing instansi, sehingga dalam melakukan kolaborasi, kedudukan semua pihak setara dan tidak ada dominasi.

Komitmen terhadap tujuan (*commitment to a common purpose*) ditunjukkan dengan adanya visi dan misi dari masing-masing pihak dalam melakukan kolaborasi. Kepercayaan antar pelaku dalam jaringan (*trust among the participants*) ditunjukkan dengan kepercayaan masing-masing aktor, sehingga dapat menciptakan kerjasama tanpa adanya kecurigaan satu sama lain. Tata pemerintahan (*governance*) mencakup batas siapa saja yang terlibat, aturan kolaborasi, hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban, dan kebebasan dalam menjalankan tugas. Dalam pengembangan IKM telah terlihat bahwa yang terlibat adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, praktisi pengusaha perak, AMIKOM Yogyakarta, Koperasi Produksi Pengusaha Perak (KP3Y), dan pengrajin. Aturan juga telah dibuat berdasarkan petunjuk teknis kegiatan yang berkaitan dengan kewajiban masing-masing aktor.

Akses terhadap kekuasaan (*access to authority*) dapat dilihat dengan adanya kebebasan atau otoritas dalam memberikan pelatihan. Pembagian akuntabilitas (*distributive accountability/responsibility*)

terlihat dengan adanya pembagian tanggung jawab dan kewenangan masing-masing aktor. Disperindag dan praktisi bertanggung jawab memberikan pelatihan *design* perak, AMIKOM dan Disperindag bertanggung jawab memberikan pelatihan *e-commerce* dan Disperindag bersama pengrajin bertanggung jawab dalam pameran. Disperindag membagikan informasi (*information sharing*) dengan *stakeholders* lain secara merata melalui media komunikasi undangan, *whatsapp* atau komunikasi langsung saat bertemu. Informasi yang diberikan mencakup kegiatan pameran, ketersediaan dana dan pelatihan.

Akses terhadap sumberdaya (*access to resourcess*) dalam pengembangan IKM kerajinan perak meliputi ketersediaan sumber keuangan, sumber daya manusia, teknis dan sumber daya lainnya yang diperlukan. Sumber keuangan dalam kegiatan pengembangan berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta. Sumber daya manusia meliputi tenaga ahli pelatih dan sumber daya lain meliputi bantuan alat.

Collaborative Governance Dalam Pengembangan IKM Kerajinan Perak

Keberhasilan dari *collaborative governance* dalam pengembangan IKM

kerajinan perak di Kotagede diukur dengan teori ukuran keberhasilan kolaborasi Deseve dalam Sudarmo (2011:115) sebagai berikut:

1. Network structure (struktur jaringan)

Menurut DeSeve terdapat tiga bentuk struktur jaringan, yaitu *self organization*, *lead organization* dan *network administrative organization*.

Berdasarkan hasil penelitian, kolaborasi pengembangan IKM kerajinan perak di Kotagede masuk kedalam bentuk struktur jaringan *network administrative organization* yaitu perpaduan jaringan *self organization* dan *lead organization* dimana *stakeholders* yang terlibat tidak terlalu banyak, tidak sering melakukan pertemuan, tidak ada struktur yang mengikat. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Jones dalam Sudarmo (2011:112) bahwa jaringan tidak boleh membentuk hierarki karena tidak akan efektif dan struktur jaringan harus bersifat sedatar organis (sedatar mungkin). Pendapat tersebut diperkuat dengan Ansell and Gash (2007: 557-561) yang mengungkapkan bahwa *stakeholders* harus membangun *face to face dialog* (dialog tatap muka) untuk membangun kepercayaan, saling menghormati,

pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses.

2. *Commitmen to a common purpose*
(komitemen terhadap tujuan)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta sebagai pelaksana pembinaan dan pelatihan di bidang industri memiliki visi yang mengarah pada terwujudnya sektor perindustrian sebagai pusat pembangunan perekonomian, wisata dan edukasi. Untuk itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Yogyakarta memiliki kewenangan dan tugas untuk mengembangkan IKM dalam kaitannya dengan pembinaan dan pelatihan di bidang produksi hingga pemasaran.

Praktisi dan pengrajin memiliki komitmen terhadap pengembangan IKM kerajinan perak yang berkaitan dengan kesejahteraan pengrajin. Komitmen yang dimiliki merupakan wujud dari keinginan mereka menjadi wirausahawan yang mandiri dan dapat berdaya saing.

AMIKOM Yogyakarta melalui lembaga pengabdian masyarakat memiliki komitmen untuk menjadi lembaga pengabdian masyarakat unggulan dunia dalam bidang

ekonomi kreatif yang berbasis *entrepreneurship*.

Mengacu pada konsep komitmen terhadap tujuan oleh DeSeve dalam Sudarmo (2011:113) realitanya setiap aktor memiliki komitmen terhadap pengembangan IKM kerajinan perak yang jelas sesuai dengan visi dan misi yang dipegang setiap aktor. Konsep DeSeve diatas diperkuat oleh pendapat Ansell and Gash (2007:557-561) mengenai *commitment to process* yang menyebutkan bahwa komitmen bersama sangat diperlukan dalam kolaborasi agar dapat mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan.

3. *Trust among the participants*
(kepercayaan antar pelaku dalam jaringan)

Dalam pengembangan IKM kerajinan perak masing-masing aktor memiliki fokus terhadap kepentingan bersama dalam pengembangan IKM kerajinan perak. Setiap aktor mengedepankan berfikir bersama dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama sehingga terjalin adanya komunikasi yang mau saling mendengar satu sama lain. Hal tersebut telah mengacu pada penjelasan DeSeve dalam Sudarmo (2011:111) bahwa didasarkan pada

hubungan profesional atau sosial, keyakinan bahwa para aktor mempercayakan pada informasi-informasi atau usaha-usaha aktor lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama.

Bagi lembaga pemerintah unsur ini sangat esensial karena harus yakin bahwa mereka bisa “percaya” terhadap rekan kerja dalam jaringan lainnya yang ada di dalam sebuah pemerintah dan rekan kerja di luar pemerintah untuk menjalankan aktivitas yang telah disetujui bersama.

Penjelasan DeSeve diperkuat dengan penjelasan Ansell and Gash (2007:557-561) bahwa proses kolaboratif bukan hanya sekedar bernegosiasi tetapi dalam kolaborasi harus membangun kepercayaan antar *stakeholders*. Selain itu, Bryson and Crosby (2006:44-45) juga menjelaskan bahwa selama kolaborasi berlangsung perlu membangun kepercayaan antar *stakeholder* yang bekerjasama dan ini sifatnya sangat penting.

4. *Governance* (tata pemerintahan)

Governance meliputi batas-batas siapa saja yang boleh terlibat dan tidak, aturan yang menegaskan sejumlah pembatasan perilaku anggota

komunitas tentang hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan hal yang tidak seharusnya dilakukan, kebebasan menentukan bagaimana kolaborasi dijalankan, dan *network management* yang berkenaan dengan resolusi penolakan/tantangan, alokasi sumber daya, kontrol kualitas dan pemeliharaan organisasi.

Kerjasama dalam pengembangan IKM kerajinan perak di Kotagede dalam pelatihan pengembangan *design* dan pelatihan *e-commerce* sudah ada batas-batas siapa saja yang boleh terlibat di dalamnya yaitu pemerintah (Disperindag Kota Yogyakarta), Praktisi pengusaha perak dan AMIKOM Yogyakarta. Sudah ada aturan jelas mengenai peran masing-masing dalam kolaborasi.

DeSeve dalam Sudarmo (2011:114) bahwa *governance* harus mempunyai batas, aturan yang mengatur sanksi dalam berjalannya kolaborasi, dari penjelasan tersebut sudah jelas bagaimana aturan kolaborasi dibuat antara Disperindag dengan AMIKOM Yogyakarta, karena kedua belah pihak telah memiliki kesepakatan tertulis (MoU).

Pendapat DeSeve juga diperkuat dengan teori yang

dikembangkan Bryson and Crosby (2006:48) mengenai *structure and goverment* yang artinya dalam kolaborasi perlu penjas siapa saja yang menjadi aktor kolaborasi, aturan yang disepakati, adanya saling percaya antar *stakeholders* yang terlibat dan kebebasan dari masing-masing *stakeholders* yang melakukan kolaborasi.

5. *Acces to authority* (akses terhadap kekuasaan)

Pemerintah melakukan kolaborasi dengan pihak swasta perlu memberikan otoritas kepada pihak yang terlibat untuk menjalankan keputusan pemerintah sesuai dengan pernyataan DeSeve dalam Sudarmo (2011:115).

Dalam melakukan pelatihan pengembangan *design* maupun pelatihan *e-commerce*, Disperindag memberikan wewenang kepada pihak praktisi maupun AMIKOM untuk menjadi tenaga pelatih dan pendamping. Adanya kejelasan otoritas yang diberikan didukung dengan adanya petunjuk teknis (juknis) untuk mempermudah pihak praktisi dan AMIKOM menjalankan kegiatan dan tugas masing-masing.

Pemerintah tidak memberikan kewenangan terhadap pengrajin maupun KP3Y selaku wadah tempat berkumpulnya para pengrajin, namun pemerintah memberikan keleluasaan kepada pengrajin maupun KP3Y untuk berinovasi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi seperti mahalnya harga bahan baku perak.

Sedangkan untuk kegiatan pameran, Disperindag Kota Yogyakarta memiliki kewenangan yang lebih besar dalam memutuskan siapa saja pelaku IKM kerajinan perak yang diikuti dalam pameran.

6. *Distributive accountability* (pembagian akuntabilitas/responsibilitas)

DeSeve dalam Sudarmo, (2011:115) bahwa pemerintah perlu melibatkan pihak lain yang terlibat untuk ikut dalam penentuan tujuan kebijakan. Pemerintah perlu mengakomodasi kepentingan pihak terkait agar kebijakan tersebut dapat diterima secara baik, dan pihak yang terlibat dapat memberikan dukungan atas kebijakan yang telah disepakati.

Pembagian akuntabilitas dalam kolaborasi pelatihan *design*, pelatihan *e-commerce* dan pameran terlihat dari pembagian tanggung jawab dan

kewenangan masing-masing aktor. Pemerintah dan praktisi bertanggung jawab memberikan pelatihan *design* perak dan AMIKOM bersama pemerintah bertanggung jawab memberikan pelatihan *e-commerce*. Dalam penyelenggaraan pelatihan maupun pameran prosedur sudah diatur dengan jelas dan tertulis yang harus dipatuhi masing-masing aktor, sehingga tidak ada pembagian pembuatan keputusan, namun dalam pembuatan keputusan pihak pemerintah selalu menerima masukan baik dari praktisi, AMIKOM maupun pengrajin sebagai pelaku IKM.

Untuk kegiatan pameran, pembuatan keputusan tersentralisir kepada Disperindag Kota Yogyakarta karena dinas sebagai penyelenggara dan pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pameran. Dalam penyelenggaraan pameran juga tidak ada ketentuan yang jelas untuk melibatkan pihak lain. Disperindag menerapkan sistem mengajak pelaku IKM untuk mengikuti pameran baik dalam atau luar kota. Dalam kegiatan pameran produk unggulan pengrajin bertanggung jawab sendiri atas produk yang dijual, termasuk penjagaan *stand* dan promosi.

Bryson and Crosby (2006:48) menegaskan jika para anggota tidak terlibat dalam menentukan tujuan *network* dan tidak berkeinginan membawa sumber daya dan otoritas ke dalam *network*, maka kemungkinan *network* akan gagal mencapai tujuan.

7. *Information sharing* (berbagi informasi)

DeSeve dalam Sudarmo (2011:112) bahwa dalam kolaborasi perlu adanya kemudahan akses yang bisa mencakup sistem, *software*, dan prosedur yang mudah dan aman untuk mengakses informasi.

Dinas selalu menyalurkan informasi yang berkaitan dengan pelatihan, pameran maupun ketersediaan dana pengembangan kepada praktisi dan pengrajin. Misalnya ketika kementerian perindustrian mengadakan kegiatan yang melibatkan pengrajin perak, dinas sebagai penyalur informasi dari kementerian perindustrian langsung meneruskan informasi tersebut kepada pengrajin. Hal tersebut juga berlaku apabila ada dana hibah atau perusahaan yang ingin melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan memberikan modal kepada pelaku usaha. Dinas juga

memberikan kemudahan akses administrasi bagi pengrajin yang ingin mengembangkan usahanya dengan perizinan atau surat keterangan lainnya. Dinas juga selalu berbagi informasi apabila ada pameran lokal maupun internasional kepada pengrajin secara terbuka.

8. *Acess to resourcess* (akses terhadap sumber daya)

Akses terhadap sumber daya meliputi ketersediaan sumber keuangan, teknis, manusia dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan network atau jaringan. Jika memungkinkan, pemerintah perlu menyediakan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya. Adanya program pelatihan dan pameran pasti membutuhkan sumber keuangan. Untuk mencukupi hal tersebut, sumber dana diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

DeSeve dalam Sudarmo (2011:115) dalam kolaborasi perlu adanya akses terhadap sumber daya, yakni berupa ketersediaan sumber keuangan, teknis, manusia dan sumber daya lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Faktor Penghambat Collaborative Governance

Berjalannya *collaborative governance* tentu terdapat faktor-faktor yang dapat menghambat jalannya kolaborasi. Faktor penghambat bisa muncul dari aktor yang terlibat, atau seperangkat aturan yang telah disepakati, dan juga karena unsur politis yang mempengaruhi terhambatnya program dalam *collaborative governance*.

Sudarmo (2011:117) menjelaskan sejumlah faktor yang dapat menghambat *collaborative governance* terutama faktor kepentingan pemerintah atau faktor yang mendominasi, struktur sosial, kultural, maupun politis. Studi di Canada dalam Sudarmo (2011:117) mengungkapkan bahwa terhambatnya suatu *collaborative governance* dapat disebabkan oleh banyak faktor, terutama faktor budaya, institusi dan politik.

Collaborative governance pengembangan IKM kerajinan perak di Kotagede memiliki hambatan sebagai berikut:

1. Pengembangan IKM kerajinan perak di Kotagede masih berjalan pendekatan *top down* oleh pihak pemerintah ketika menjalin kolaborasi. Hal tersebut terlihat dalam pelatihan *design* atau pelatihan *e-*

commerce, bukan pengrajin yang aktif mencari peluang pelatihan, namun pemerintahlah yang lebih aktif dalam mencari peserta pelatihan. Menurut *Government of Canada* dalam (Sudarmo, 2011:117- 120) bahwa kolaborasi dapat terhambat karena partisipasi dari kelompok kepentingan lain sering kali masih dipandang bukan hal utama dan tidak diperlukan, tidak penting dan didominasi oleh pihak pemerintah.

2. Mengacu pada *Government of Canada* dalam Sudarmo (2011:117- 120) yang mengatakan bahwa kolaborasi bisa saja terhambat jika para pemimpin dari kelompok-kelompok yang berkolaborasi kurang atau tidak inovatif dalam mencapai tujuan-tujuan politik yang cenderung kompleks dan berpeluang menimbulkan konflik satu sama lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengembangan IKM kerajinan perak di Kotagede pemimpin (pemerintah) masih kurang inovatif dalam mengembangkan IKM kerajinan perak, hal tersebut ditunjukkan oleh tidak adanya *marketplace* khusus hasil kerajinan perak kotagede yang dipantau atau dikelola oleh pemerintah dan

pengrajin. Pemerintah juga tidak menjembatani pengrajin perak dengan toko-toko modern yang saat ini menjadi pusat perbelanjaan yang banyak dikunjungi masyarakat, padahal hal tersebut dapat membantu pengrajin dalam hal pemasaran. Pemerintah belum bisa memberikan inspirasi terhadap agenda kegiatan yang ditentukan.

SIMPULAN DAN SARAN

Collaborative governance dalam pengembangan IKM kerajinan perak di Kotagede yang dilakukan antara Disperindag Kota Yogyakarta, praktisi, AMIKOM, KP3Y, dan pengrajin sudah berjalan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan 1) Struktur jaringan yang tidak mengikat dan terdapat koordinasi dalam setiap kegiatan. 2) Komitmen masing-masing anggota kolaborasi yang tertuang dalam visi-misi masing-masing instansi. 3) Kepercayaan masing-masing aktor kolaborasi. 4) Tata pemerintahan yang memperjelas siapa saja yang terlibat, serta aturan main dalam kolaborasi. 5) Kewenangan terhadap kekuasaan yang diberikan Disperindag Kota Yogyakarta kepada pihak praktisi maupun AMIKOM untuk menjadi tenaga pelatih dan pendamping. 6) pembagian akuntabilitas dengan pembagian tanggung jawab dan kewenangan dari dinas kepada masing-

masing aktor. 7) Pembagian informasi dari dinas yang berkaitan dengan pelatihan, pameran maupun ketersediaan dana pengembangan kepada praktisi dan pengrajin. 8) tersedianya akses sumber keuangan, teknis, manusia dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan network atau jaringan.

Adapun faktor penghambat collaborative governance berupa kurangnya partisipasi aktif pengrajin terhadap program pengembangan dan kurangnya inovasi dari pemerintah terhadap kolaborasi sehingga belum ada kerjasama terhadap toko modern.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penelitian memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta perlu mewajibkan pelaku IKM kerajinan perak mengikuti kegiatan pelatihan *e-commerce* dengan cara mendata secara berkala pengrajin yang harus mengikuti pelatihan.
2. Bagi pihak swasta khususnya praktisi dan AMIKOM Yogyakarta bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan selain memberikan pelatihan

bagaimana cara berjualan secara *online*, pengrajin perlu di dukung untuk penjualan kerajinan perak secara *online* dengan adanya kerjasama dari pemerintah dan AMIKOM Yogyakarta untuk membuat *marketplace* khusus penjualan hasil kerajinan perak Kotagede Yogyakarta.

3. Bagi pengrajin, Perlu adanya peran aktif pengrajin untuk kooperatif mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan, baik pelatihan pengembangan *design*, maupun pelatihan *e-commerce*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C. & Gash, A. (2000). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*: J-PART, Vol. 18, No. 4 hal. 543-571.
- Bryson, J. M., B. C. Crosby and M. M. Stone. (2006). "The Design and Implementation of Cross Sector Collaborations: Propositions from the literature." *Public administration review* 66 : 44-55.
- Dwiyanto, A. (2010). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Gadjah Mada University Press
- Moleong, L.J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

- Morse, R. & Stephens J.B. (2012). Teaching Collaborative Governance: Phases, Competencies, and Case-Based Learning. *Journal of Public Affairs Education*, Vol. 18, No. 3 (Summer 2012), hal. 565-583.
- Sranko, George R. (2011). *Collaborative Governance and Strategic Approach to Facilitating Change: lessons learned from forest agreements in South East Queensland and the Great Bear Rainforest*. A journal for and about social movements. Vol. 3 (1). hal. 210-239.
- Sudarmo. 2011. *Isu-Isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance*. Solo: Smart Media.
- Sugiyono. (2011). *Metodologi Penelitian Administratif*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Tang and Mazmanian. (2008). *An Agenda for the Study of Collaborative Governance*. USC Judith and John Bedrossian Center on Governance and the Public Enterprise, School of Policy, Planning and Development, University of Southern California. hal. 1-43.
- Vangen and Huxham. (2003). Nurturing Collaborative Relations Building Trust in Interorganizational Collaboration. *The Journal of: Applied Behavioral Ascience*. Vol.39 hal.5-31.

